

## DAFTAR PUSTAKA

- Djaenuri, A. (1999). Sejarah Terbentuknya Desa. Modul, 3. <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/IPEM420802-M1.pdf>
- Roza, D., & S, L. A. (2018). Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 4(3), 606–624.
- Bender, D. (2016). DESA - Optimization of variable structure Modelica models using custom annotations. *ACM International Conference Proceeding Series*, 18-April-2(1), 45–54.
- EKO PAMBUDI, D. (2017). KESIAPAN PEMERINTAH DESA DALAM MELAKSANAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Implementasi Dana Desa di Desa Sidorejo Kebonsari Kabupaten Madiun). 1–28.
- Manialup, A. W., Nangoi, G. B., & Morasa, J. (2017). Peran Inspektorat Dalam Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(2), 20–29. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17164>
- Armando, G. (2013). Pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah dan pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah. *Jornal Universitas Negeri Padang*, Hal.27.
- Kurniasari, D. (2020). Peran Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Dana Desa Di Kabupaten Brebes Tahun 2018. *Ilmu Sosial Dan Politik*, 1, 23–26. <http://repository.upstegal.ac.id/851/>
- (Sukatin et al., 2022) Sukatin, Nurkhalipah, Kurnia, A., Ramadani, D., & Fatimah. (2022). Humantech *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia*, 1(9), 1278–1285.
- Mulyana, D., Solatun, Arrianie, L., Kuswarno, E., Schmid, T. J., Jones, R. S., Turner, R. E., Edgley, C., Ball, D. W., McCullough, P., Wahl-Jorgensen, K., Shaw, A., & Astuti, S. I. (2013). *Metode Penelitian Komunikasi* (p. 424).
- Sosial, K., & Kinerja, D. A. N. (2009). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 1–118.

Noviades, D. (2013). PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI ERA OTONOMI DAERAH Oleh : Dhils Noviades 1. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 81–97.

Timotius, R. (2018). Revitalisasi Desa Dalam Konstelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 323.

Firmansyah, D., & Dede. (2022). Teknik Pengambilan Sampel Umum dalam Metodologi Penelitian: Literature Review. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH)*, 1(2), 85–114. <https://doi.org/10.55927/jiph.v1i2.937>

Hanifah, Suci Indah & Praptoyo, S. (2015). Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 4(8), 1–15.

(Ningsih et al., 2020)Ningsih, W., Fefri, I., Arza, V., Fitria, S., Jurusan, A., Fakultas, A., Universitas, E., Padang, N., & Fakultas, J. A. (2020). ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (Studi Kasus Pada Empat Desa Dalam Empat Kecamatan di Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat ). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(4), 2656–3649.

Seputro, H. Y., Wahyuningsih, S. D., & Sunrowiyati, S. (2017). Potensi Fraud Dan Strategi Anti Fraud Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA)*, 2(1), 79–93.

Mudhofar, M. (2022). Analisis Implementasi Good Governance Pada Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 10(1), 21–30.

Dr. Widowati, H. M. S. (2020). Dalam Kajian Jurnal Hasil Penelitian. In *Metodologi Penelitian dalam Kajian Jurnal Hasil Penelitian*.

Sihaya & Lalaun. (2015). Pemberdayaan Masyarakat dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Punagaya Kecamatan Bangala Kabupaten Jonoponto. *Jurnal Ilmian Ilmu Ekonomi*, 6(11), 74–80.

Lekipiouw, S. H., Salmon, H., & Lainsamputty, N. (2021). Model Pengawasan Dan Tata Hubungan Kewenangan Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa. *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 14.

Pamungkas, B. A. (2019). Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Usm Law Review*, 2(2), 210.

Prasetyo, A., & Muis, A. (2015). Pengelolaan Keuangan Desa Pasca UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa: Potensi Permasalahan dan Solusi. *Jurnal Desentralisasi*, 13(1), 16–31.

# LAMPIRAN

## Lampiran 1: Surat Keterangan Inspektorat Bone



### PEMERINTAH KABUPATEN BONE INSPEKTORAT DAERAH

JL. H. A. Mappanyukki Lt. III Tlp./Fax. (0481) 24461 Watampone

#### SURAT KETERANGAN

Nomor : 800 / 420 / VI / 1 TP0

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. A. MUH. YAMIN AT, M.Si  
Nip : 19680725 199303 1 005  
Jabatan : Inspektur Daerah Kabupaten Bone

Menerangkan bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : ANDI MAPPARESSA  
Nim : E051191036  
Prodi : Ilmu Pemerintahan  
Alamat : Jalan Kalimantan Lr. 1. No.29 Kelurahan Manurunge  
Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone.

Telah Melaksanakan Penelitian dalam rangka penyusunan skripsi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bone pada tanggal 23 Juni s.d 6 Juli 2023.

Demikian disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan selanjutnya.

Watampone, 6 Juli 2023

INSPEKTOR DAERAH,



## Lampiran 2: Surat Keterangan Desa Bacu



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE  
KECAMATAN BAREBBO  
DESA BACU**

Alamat : Desa Bacu Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : 155/D.BC/BRB/VI/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andi Darmawati, S.Pd.SD  
Jabatan : Kepala Desa Bacu Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone

Menerangkan bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : ANDI MAPPARESSA  
Nim : E051191036  
Prodi : Ilmu Pemerintahan  
Alamat : Jalan Kalimantan Lr. 1. No.29 Kelurahan Manurunge  
Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone.

Telah Melaksanakan Penelitian dalam rangka penyusunan skripsi pada Desa Bacu Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone pada tanggal 23 Juni s.d 6 Juli 2023.

Demikian disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan selanjutnya.

Bone, 6 Juli 2023  
KEPALA DESA BACU,  
ANDI DARMAWATI, S.Pd.SD







